

# MEMBANGUN KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM ANALISA KEPENTINGAN, ANCAMAN, DAN KEKUATAN LAUT

## DEVELOPING FORMIDABLE INDONESIAN MARITIME SECURITY IN THE ANALYSIS OF INTEREST, THREAT, AND SEA POWER

Syaiful Anwar<sup>1</sup>

Universitas Pertahanan  
(morolawe7760@yahoo.com.au)

**Abstrak** - Keamanan maritim Indonesia merupakan bagian penting dari sistem kemaritiman Indonesia, dan mengandung misi yang cukup kompleks yang menjadi tantangan dan sekaligus permasalahan dari berbagai pihak yang terlibat. Pemahaman terhadap keamanan maritim dari berbagai pihak yang terlibat masih belum sepenuhnya sama, dikarenakan perbedaan yang mendasar dari bidang-bidang tugas yang mereka geluti. Untuk itu dalam tulisan ini, penulis mencoba merumuskan berbagai hal yang terkait dengan kemaritiman Indonesia, berdasarkan analisa kepentingan, ancaman, dan kekuatan laut. Beberapa hal yang menjadi bahan analisis yaitu: kepentingan nasional Indonesia di bidang kemaritiman, ancaman yang perlu menjadi perhatian utama dalam penanganannya, pengertian dan lingkup keamanan maritim, serta upaya-upaya yang diperlukan dalam membangun kekuatan maritim Indonesia.

**Kata Kunci** : keamanan maritim, Indonesia, kekuatan laut, kemaritiman, pengendalian laut.

**Abstract** - Indonesian maritime security is an important part of the Indonesian maritime system, and contains fairly complex mission that are the challenges as well as the problems of the various parties involved. An understanding of the maritime security of the various parties involved is still not completely the same, due to fundamental differences of the task areas they are in. Therefore in this paper, the author tries to formulate a variety of matters related to the Indonesia's maritime, based on analysis of interest, threat, and sea power. Several issues become the substance of the analysis: Indonesia's national interests in the maritime field, several threats that need to be handled first, the definition and scope of the Indonesia's maritime security, and the efforts needed to build an Indonesia's maritime power.

**Keywords** : maritime security, Indonesia, sea power, maritime, sea control

### Pendahuluan

"Jalesveva Jayamahe, di laut justru kita jaya, semboyan kita di masa lalu harus kembali lagi."

Presiden Jokowi

---

<sup>1</sup> Mayor Jenderal (Purn), Doktor dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Dosen Tetap Universitas Pertahanan Indonesia.

Indonesia adalah negara kepulauan atau *archipelagic state* terbesar di dunia yang berada di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta menghubungkan dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas perairan, laut teritorial dan perairan pedalaman, lebih kurang 2,7 juta kilometer persegi, atau sekitar 70% dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dengan tambahan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 3,1 juta kilometer persegi, maka total luas wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia menjadi 5,8 juta kilometer persegi. Wilayah laut seluas itu tentu saja menjadi sumber daya alam yang sangat besar, baik sumber daya perikanan maupun sumber daya dari dasar lautan. Bangsa Indonesia tentu saja berpeluang besar untuk menjadikan laut sebagai sumber penting bagi aktivitas ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan posisi yang sangat strategis tersebut, menjadikan wilayah perairan Indonesia dilewati oleh jalur utama kapal-kapal laut dari banyak negara, baik kapal-kapal dagang maupun kapal-kapal angkatan laut dari berbagai negara di dunia.

Dengan banyaknya potensi yang dapat digali dari wilayah perairan Indonesia, maka tentu saja hal ini akan membarikan dampak yang tidak dapat terelakkan, yaitu akan munculnya ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia, khususnya dalam bidang kemaritiman. Ancaman dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari negara tertentu maupun dari aktor non-negara, dengan intensitas ancaman yang beragam pula. Dengan kenyataan akan munculnya berbagai jenis ancaman tersebut, maka Indonesia perlu menanggapi dengan kemampuan dan kekuatan keamanan maritim yang memadai, agar berbagai ancaman tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Namun telah disadari bersama bahwa penyelenggaraan keamanan maritim tidaklah mudah, karena memerlukan penataan atau *governance* yang sistematis, serta pengaturan atau manajemen yang baik pula. Hingga saat ini dirasakan bahwa berbagai permasalahan masih tampak, antara lain belum sepakatnya berbagai pihak tentang pengertian dan lingkup dari keamanan maritim itu sendiri, apa saja ancaman yang memerlukan prioritas penanganan dibandingkan dengan ancaman-ancaman yang lain, apa saja prioritas yang perlu dibangun dalam hal keamanan maritim, serta faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam hal kita membangun keamanan maritim yang tangguh.

Dengan munculnya berbagai permasalahan tersebut, dalam naskah ini penulis akan mengangkat beberapa hal dari permasalahan tersebut. Penulis menetapkan bahwa yang menjadi lingkup permasalahan dari tulisan ini adalah “Bagaimana cara membangun keamanan maritim Indonesia, dalam analisis kepentingan, ancaman, dan kekuatan laut?” Tulisan ini disusun dengan maksud agar berbagai pihak yang memang berkecimpung atau yang berminat didalam hal-hal yang berkaitan dengan keamanan maritim Indonesia, memiliki persepsi yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan upaya pembangunan kekuatan maritim Indonesia.

Tulisan ini akan meliputi berbagai hal yang terkait dengan upaya membangun keamanan maritim Indonesia. Analisis akan dimulai dengan penetapan kepentingan nasional Indonesia di bidang kemaritiman. Dengan menganalisis berbagai ancaman dan gangguan, maka selanjutnya akan dapat kita formulasikan ancaman apa saja yang perlu dijadikan fokus perhatian kita untuk ditangani. Dengan melakukan komparasi atau perbandingan lingkup dari keamanan maritim yang diselenggarakan oleh berbagai negara atau berbagai pihak, maka dalam tulisan ini penulis akan mencoba untuk merumuskan pengertian dan lingkup misi dari keamanan maritim Indonesia. Pengertian tersebut diperlukan sebagai dasar bagi penetapan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia dalam membangun kekuatan keamanan maritim, yang menjadi keluaran utama dari analisis tulisan ini.

### **Keentingan Nasional di Bidang Maritim**

Dalam bagian ini, perumusan kepentingan nasional akan dianalisis dari sudut pandang kepentingan nasional. Menurut *the US DoD Dictionary Military Terms*, kepentingan nasional diartikan sebagai dasar atau fondasi dari pengembangan sasaran nasional yang menetapkan sasaran dan tujuan. Pengertian yang lebih luas adalah bahwa kepentingan nasional adalah kebutuhan dan keinginan yang ditetapkan oleh suatu negara berdaulat dalam berhubungan dengan negara-negara berdaulat lainnya, aktor-aktor bukan negara, dan kesempatan serta situasi dalam suatu lingkungan strategis yang berkembang yang ditampilkan sebagai sasaran yang ingin dicapai. Pengertian yang lebih luas ini menjelaskan dinamika dari suatu lingkungan strategis dimana berbagai aktor, kesempatan, dan interaksi memainkan perannya, baik komponen internal maupun komponen eksternal

dikenali. Kepentingan digambarkan sebagai sasaran akhir atau kondisi akhir yang diinginkan, baik secara umum maupun secara khusus.<sup>2</sup>

Menentukan kepentingan nasional biasanya dilakukan dengan menjabarkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan nasional yang telah ditetapkan, dan biasanya juga dikaitkan dengan langkah berikutnya berdasarkan kategorisasi strategi yang akan digunakan untuk mencapai masing-masing elemen nasional tersebut. Kepentingan nasional yang inti perlu ditetapkan dahulu, kemudian barulah ditetapkan kepentingan-kepentingan nasional yang lain. Setelah berbagai elemen dari kepentingan nasional tersebut ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan intensitas dari setiap kepentingan tersebut. Tingkat intensitas menunjukkan tingkat pentingnya dan prioritas dari kepentingan tersebut. Penetapan ini diperlukan untuk membantu kita dalam menetapkan strategi yang diambil untuk merealisasikannya. Ada empat tingkat intensitas dari kepentingan nasional: (i) kelangsungan hidup (*survival*), adalah kepentingan yang jika tidak dicapai akan berujung pada kerusakan yang parah pada satu atau beberapa aspek utama dari kepentingan nasional inti; (ii) sangat penting (*vital*), adalah kepentingan yang jika tidak dicapai akan memberikan konsekuensi segera terhadap kepentingan nasional inti; (iii) penting (*important*), adalah kepentingan nasional yang jika tidak dicapai akan merusak dan pada akhirnya akan berdampak terhadap kepentingan nasional inti; dan (iv) pelengkap (*peripheral*), adalah kepentingan nasional yang jika tidak dicapai akan menghasilkan kerusakan tetapi tidak akan berdampak pada kepentingan nasional inti.<sup>3</sup>

Untuk menetapkan kepentingan nasional Indonesia di bidang maritim, maka beberapa pandangan dari pemerintah perlu dilihat secara seksama. Salah satu pandangan yang dapat dijadikan sumber penetapan kepentingan nasional adalah dari Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia akan difokuskan pada lima pilar utama, yaitu: (i) Membangun kembali budaya maritim Indonesia; (ii) Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama; (iii) Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, *deep*

---

<sup>2</sup> H. R Yarger, "The Strategic Appraisal: The Key to Effective Strategy", dalam J. B. Bartholomeus (Ed), *Theory of War and Strategy*, Volume I, (US: US Army War College, 2008), hlm. 53.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim; (iv) Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan; dan (v) Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.<sup>4</sup>

Informasi berikutnya yang perlu diakomodir dalam penetapan kepentingan di bidang maritim Indonesia adalah pernyataan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang menyatakan bahwa agenda prioritas pemerintah di bidang kemaritiman adalah: (i) Mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim, dan sumber daya alam; dan (2) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya dengan membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama.<sup>5</sup>

Masukan yang juga sangat penting dalam penetapan kepentingan nasional di bidang maritim adalah pernyataan dari Kementerian Pertahanan (Kemhan RI) bahwa: “Pokok – pokok kebijakan pertahanan yang menjadi prioritas Kemhan tahun 2016 diarahkan pada pencapaian percepatan implementasi kebijakan pertahanan maritim dalam sistem pertahanan negara guna mendukung perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Kemhan RI di tahun 2016 akan melakukan beberapa program antara lain adalah: (i) melanjutkan program pemberdayaan dan pengamanan wilayah perbatasan darat dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan; (ii) melanjutkan pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan (PPKT) khususnya di Natuna; (iii) menjabarkan kebijakan nasional mengenai Laut Cina Selatan baik kebijakan eksternal maupun internal; (iv) memperkuat kebijakan pertahanan maritim; (v) kebijakan modernisasi Alutsista diprioritaskan untuk menghadapi ancaman

---

<sup>4</sup> Kemlu RI, “Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”, dalam <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers>, diunduh pada 19 September 2016.

<sup>5</sup> Kemenko Kemaritiman RI, “Program Kerja Kemenko Kemaritiman RI”, dalam <http://maritim.go.id/program-kerja>, diunduh pada 19 September 2016.

nyata dan belum nyata serta menghadapi ancaman nyata dan belum nyata serta penguatan poros maritim.<sup>6</sup>

Selain memperhitungkan berbagai pendapat dari dalam negeri, kita perlu juga melihat negara-negara lain terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan elemen-elemen penting dari kepentingan nasional mereka di bidang maritim. Hal ini dilakukan dalam rangka membantu kita dalam menetapkan prioritas dan intensitas dari kepentingan nasional yang akan kita tetapkan. Berbagai negara juga telah dengan seksama menetapkan kepentingan nasional di bidang maritim, salah satu di antaranya adalah India, yang merupakan negara tetangga kita yang berlokasi di sekitar Samudra Hindia. Beberapa elemen dari kepentingannya antara lain: (i) memelihara keseimbangan kekuatan agar tidak ada kekuatan manapun yang akan mendominasi jalur laut; (ii) mengamankan jalur pelayaran komersial dari dan ke India; (iii) mengamankan laut dari segala ancaman keamanan, seperti pembajakan kapal di laut atau *piracy*; dan (iv) mengadakan kerjasama internasional di bidang maritim dengan beberapa negara di kawasan.<sup>7</sup>

Dari berbagai penjelasan di atas, selanjutnya kita lakukan inventarisasi berbagai elemen kepentingan nasional kita tersebut. Penilaian terhadap tingkat intensitas kita lakukan secara intuitif dengan membandingkan berbagai pendapat dari beberapa sumber tentang elemen-elemen yang relevan. Elemen-elemen tersebut kita kelompokkan berdasarkan lokasinya didalam tataran strategi yang akan digunakan dalam merealisasikan kepentingan tersebut. Adapun hasil dari inventarisasi dan penentuan tingkat intensitas serta kategorisasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Elemen-Elemen Kepentingan Nasional dan Tingkat Intensitasnya

Kategori	Elemen Kepentingan Nasional	Tingkat Intensitas
Diplomasi	Kerjasama internasional di bidang maritim (pencemaran laut, perompakan dsb)	Penting
	Pembicaraan tentang pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing	Penting
	Penanganan pelanggaran kedaulatan	<i>Survival</i>

<sup>6</sup> Kemhan RI, "Kebijakan Pertahanan 2016 Diarahkan Untuk Mempercepat Implementasi Kebijakan Pertahanan Maritim", dalam <https://www.kemhan.go.id/2016/01/20>, diunduh pada 19 September 2016.

<sup>7</sup> A. C. Winner, "India as a Maritime Power?", dalam Yoshihara dan J. R. Holmes (Eds), *Asia Looks Seaward: Power and Maritime Security*, (Westport: Praeger Security International, 2008), hlm.130.

	Penanganan sengketa wilayah	Vital
Pembangunan kekuatan maritim	Pembangunan budaya maritim bagi seluruh bangsa Indonesia	Vital
	Pembangunan kekuatan sipil untuk keselamatan pelayaran dan keamanan maritim	Vital
	Membangun pelabuhan laut	Penting
	Menciptakan pasar bagi produk-produk dari laut	Penting
Pertahanan dan keamanan negara	Penjagaan batas negara, kedaulatan negara, pulau-pulau terluar	<i>Survival</i>
	Pembangunan kekuatan militer aspek maritim	Vital
	Pengamanan sumber daya alam dari praktik ilegal	Vital
	Pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar	Penting
	Penjagaan laut Cina Selatan dari upaya klaim sepihak dari pihak asing	<i>Survival</i>

Sumber : Diolah oleh Penulis

Dari hasil penetapan intensitas yang dapat dilihat di Tabel 1, maka langkah selanjutnya akan dikelompokkan elemen-elemen tersebut berdasarkan urutan tingkat intensitasnya. Hal ini diperlukan agar dalam menetapkan strategi dan kebijakan untuk mengamankan kepentingan nasional tersebut, kita akan mencurahkan perhatian dan pengalokasian sumber daya bagi kepentingan nasional yang berada diprioritas paling atas, dan selanjutnya kepada prioritas dibawahnya setelah prioritas diatasnya tadi sudah dapat kita tangani secara seksama. Hasil penetapan akhir dari kepentingan nasional Indonesia di bidang maritim dapat dilihat pada Gambar 1.

**Gambar 1.** Kepentingan Nasional Indonesia di Bidang Maritim



Sumber: Dari Penulis.

## Ancaman terhadap Kepentingan Nasional di Bidang Maritim

Dalam bagian ini akan dibahas berbagai kemungkinan ancaman terhadap kepentingan nasional di bidang maritim. Dari pembahasan di bagian sebelumnya kita dapatkan bahwa ada tiga kelompok kepentingan, yang selanjutnya akan kita analisis kemungkinan ancaman terhadap masing-masing kepentingan tersebut dengan menggunakan pendekatan ancaman. Menurut Barry Buzan ancaman terhadap keamanan negara dapat berbentuk: (i) ancaman militer, yang berpotensi merusak berbagai komponen negara bahkan negara itu sendiri secara total; (ii) ancaman terhadap ideologi, yang termasuk dalam kategori ancaman berdimensi politik; (iii) ancaman di bidang ekonomi, seperti: embargo, pembatasan ekspor dan impor barang, pencurian sumber daya alam, penghentian pasokan bahan-bahan penting; (iv) ancaman di bidang lingkungan atau ekologi, seperti bencana alam, polusi, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Kemungkinan ancaman tersebut merupakan potensi yang dapat saja terjadi, namun harus dilihat dari berbagai faktor. Lebih lanjut, Barry Buzan menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang harus dilihat dalam konteks ancaman tersebut, yakni: (i) sumber ancaman, yang dapat dari dalam negara sendiri, atau dapat berasal dari luar negara; (ii) intensitas ancaman, yang dapat berkisar dari intensitas yang rendah hingga sangat tinggi, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jarak dari sumber ancaman ke negara kita, jangka waktu datangnya ancaman, dan kemungkinan atau tingkat probabilitas terjadinya ancaman tersebut.<sup>9</sup>

Ancaman yang dapat timbul dalam dunia kemaritiman sangat beragam, dan pada umumnya setiap negara atau setiap pihak menetapkan jenis ancamannya secara berbeda, tergantung kepada berbagai faktor yang terkait dengan ancamannya sendiri maupun kerentanan atau *vulnerability* dari pihak yang merasa terancam. Beberapa pihak menempatkan ancaman di bidang maritim sebagai berikut: sengketa atau *dispute* antar negara, terorisme maritim, pembajakan atau *piracy*, penyelundupan narkotika, penyelundupan orang dan barang terlarang, pengayaan atau *proliferation* senjata,

---

<sup>8</sup> Barry Buzan, *People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations*, (Sussex: Wheatsheaf Books, 1983), hlm. 75-83.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 83-5.

penangkapan ikan ilegal, pencemaran lingkungan, atau kecelakaan dan bencana alam maritim.<sup>10</sup>

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, dalam laporannya tentang Hukum Laut mengidentifikasi tujuh ancaman spesifik di bidang kemaritiman, yakni (i) pembajakan dan perompakan bersenjata terhadap kapal; (ii) aksi teroris terhadap pelayaran, instalasi di laut, dan kepentingan-kepentingan maritim lainnya; (iii) penyelundupan senjata dan senjata pemusnah massal; (iv) penyelundupan narkoba dan bahan-bahan psikotropika; (v) penyelundupan manusia lewat laut; (vi) penangkapan ikan secara ilegal; dan (vii) pencemaran lingkungan laut.<sup>11</sup>

Dari kedua sumber referensi tersebut, selanjutnya dapat kita inventarisir secara umum sejumlah ancaman yang dapat terjadi di bidang kemaritiman (lihat Tabel 2). Berbagai jenis ancaman tersebut kemudian digolongkan berdasarkan bentuknya, yang dapat berupa ancaman militer atau sejenisnya, ancaman berdimensi politik, ancaman berdimensi ekonomi, dan juga ancaman yang berdimensi lingkungan hidup. Penggolongan ancaman ini diperlukan agar secara kualitatif dapat ditetapkan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. Selanjutnya ancaman tersebut dilihat dari sumbernya, yang dapat saja berasal dari dalam negeri dan atau dari luar negeri. Ancaman yang murni berasal dari dalam negeri tentu saja memerlukan penanganan standar, namun untuk ancaman yang berasal dari luar negeri memerlukan kerjasama internasional dengan berbagai pihak atau negara lain. Selanjutnya berbagai ancaman tersebut dinilai intensitasnya, berdasarkan faktor-faktor intensitas yang sudah disampaikan sebelumnya. Faktor intensitas secara kualitatif digolongkan menjadi tiga tingkatan, yaitu intensitas tinggi, intensitas sedang, dan intensitas rendah. Penggolongan ini diperlukan untuk memberikan fokus perhatian dan sekaligus prioritas dalam penanganannya, yang tentu saja ancaman yang berintensitas tinggi akan menjadi prioritas utama dalam penanganannya.

---

<sup>10</sup> C. Bueger, "What is Maritime Security?", *Marine Policy Journal*, No. 53, 2015, hlm. 159.

<sup>11</sup> N. Klein, et.al., *Maritime Security: International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand*, (Oxon: Routledge, 2010), hlm.7.

**Tabel 2.** Jenis Ancaman di Bidang Kemaritiman

No	Jenis Ancaman	Bentuk Ancaman	Sumber Ancaman	Intensitas Ancaman
1	Sengketa antar negara	M, P, E	L	S
2	Terorisme maritim	M, P, E	L, D	S
3	Pembajakan	M, E	L, D	T
4	Penyelundupan narkoba	P, E	L, D	T
5	Penyelundupan manusia	P, E	L, D	T
6	Pengayaan senjata	M, P, E	L, D	R
7	Penangkapan ikan ilegal	P, E, L	L, D	T
8	Pencemaran lingkungan	E, L	L, D	T
9	Kecelakaan di laut	E	L, D	T
10	Bencana alam	E, L	D	T

Sumber : Diolah oleh Penulis

Keterangan:

Bentuk ancaman: M: militer; P: politik; E: ekonomi; L: lingkungan.

Sumber ancaman: L: dari luar negeri; D: dari dalam negeri.

Intensitas: T: tinggi; S: sedang; R: rendah.

Dari penilaian secara kualitatif tersebut, selanjutnya dapat kita urutkan lima ancaman yang memerlukan prioritas dalam penanganannya. Kelima jenis ancaman tersebut adalah sebagai berikut (lihat Gambar 2):

1. Pembajakan di laut, khususnya terhadap kapal-kapal dagang kita maupun kapal-kapal dagang asing yang sedang berlayar di perairan Indonesia;
2. Penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing*, terutama yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing di perairan Indonesia;
3. Sengketa antar negara Indonesia dengan negara-negara lain tentang batas-batas laut, baik batas laut teritorial maupun zona ekonomi eksklusif;
4. Penyelundupan narkoba dan bahan-bahan psikotropika melalui laut; dan
5. Penyelundupan manusia atau *human trafficking* melalui laut.

**Gambar 2.** Jenis Ancaman Utama di Bidang Kemaritiman Indonesia



Sumber: Diolah oleh Penulis

### **Keamanan Maritim Indonesia**

Berbagai pihak masih mempunyai pandangan yang beragam tentang pengertian keamanan maritim termasuk lingkup permasalahan yang dihadapinya. Dalam bagian ini beberapa pandangan yang berbeda tersebut akan disampaikan, selanjutnya dengan dihadapkan dengan kepentingan nasional Indonesia di bidang kemaritiman, penulis akan membahas konsep ini agar didapatkan suatu pengertian keamanan maritim serta cakupannya yang sesuai dengan kepentingan nasional kita tersebut. Pengertian tentang keamanan maritim ini diperlukan sebagai pijakan dalam merumuskan upaya-upaya yang diperlukan dalam membangun keamanan maritim yang kuat.

Dalam pandangan militer pada umumnya, keamanan maritim biasanya difokuskan pada masalah keamanan nasional, dalam upaya melindungi keutuhan wilayah negara dari serangan bersenjata atau penggunaan jenis kekuatan lainnya, serta memproyeksikan kepentingan negara ke wilayah-wilayah lain. Sementara itu dari perspektif pertahanan negara, keamanan maritim melingkupi hal-hal yang lebih luas dalam menghadapi lebih banyak jenis ancaman di bidang maritim. Sebagai contoh, konsep operasi dari Angkatan Laut Amerika Serikat menyebutkan bahwa sasaran dari operasi keamanan maritim mereka meliputi perlindungan kebebasan bernavigasi dari kapal-kapal dagang mereka, melindungi pelayaran dagang mereka, melindungi sumber daya laut, serta melindungi wilayah maritim dari ancaman negara tertentu, terorisme, penyelundupan obat terlarang, dan bentuk-bentuk lain dari kejahatan, pembajakan, kerusakan lingkungan, dan imigrasi ilegal lewat laut.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> N Klein, et.al, *op. cit*, hlm. 5.

Sementara itu, dari pihak industri perkapalan, keamanan maritim secara khusus difokuskan pada sistem transportasi maritim dan menghubungkannya dengan sampainya kiriman barang dengan aman di tempat tujuan tanpa gangguan dari segala bentuk kejahatan. Konsisten dengan pandangan ini, muncul pengertian keamanan maritim yang diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemilik, operator, dan administrator dari kapal dagang, fasilitas pelabuhan, instalasi lepas pantai, dan organisasi kelautan lainnya dalam melindungi kapalnya dari perampasan, sabotase, pembajakan, pencurian, gangguan, atau serangan dadakan. *The International Maritime Organization* (IMO) membedakan antara keselamatan maritim dan keamanan maritim. Keselamatan maritim atau *maritime safety* merujuk pada pencegahan atau mengurangi terjadinya kecelakaan di laut yang disebabkan oleh kapal yang dibawa standar, awak kapal atau operator yang tidak cakap, sementara keamanan maritim atau *maritime security* terkait dengan perlindungan kapal dari aksi-aksi yang melanggar hukum, yang disengaja atau direncanakan.<sup>13</sup>

Christian Bueger menyatakan pendapatnya bahwa keamanan maritim mengandung empat konsep keamanan, yakni kekuatan laut atau kekuatan angkatan laut (*sea power*), keselamatan laut atau *marine safety*, ekonomi laut dalam atau *blue economy*, dan keamanan manusia atau *human security*. Konsep dari kekuatan laut menjelaskan tentang peran angkatan laut, yaitu melindungi keberlangsungan negara, melindungi jalur transportasi laut bagi perdagangan dan peningkatan ekonomi. Konsep keselamatan di laut menjelaskan keselamatan kapal dan instalasi laut dengan tujuan utamanya untuk melindungi para profesional dan lingkungan laut. Keamanan maritim juga berkaitan dengan pembangunan di bidang ekonomi, dimana laut berperan sangat penting dalam perdagangan, dan perikanan. Laut mengandung sumber daya alam yang sangat penting, seperti minyak, dan bahan tambang dari dasar lautan. Pariwisata pantai juga menjadi sumber pendapatan ekonomi yang penting. Konsep keamanan manusia juga terkait dengan keamanan maritim, yang mengandung unsur-unsur seperti ketersediaan makanan, ketersediaan tempat tinggal, kehidupan berkelanjutan, dan tersedianya lowongan kerja yang aman.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>14</sup> C. Bueger, *op. cit.*, hlm.161.

Dari berbagai pandangan tersebut dapat diinventarisir bidang subtugas yang masuk dalam lingkup keamanan maritim, baik dari sudut pandang pelaku militer maupun dari sudut pandang sipil. Hasil inventarisir tersebut dapat dilihat pada Tabel 3, dimana sejumlah unsur tersebut selanjutnya dikategorikan menjadi empat, yaitu: (i) bidang keamanan maritim yang menyangkut negara atau kedaulatan negara, yang pada umumnya tugas ini menjadi domain dari militer, khususnya angkatan laut; (ii) bidang keamanan yang menyangkut dengan penegakan hukum di laut, yang pada umumnya bidang tugas ini ditangani oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian negara, badan keamanan laut atau *coast guard*, bea dan cukai, badan pengamanan perikanan, dan juga angkatan laut; (iii) bidang keselamatan pelayaran, dimana bidang tugas ini utamanya ditangani oleh badan pemerintah yang mengawasi transportasi atau pelayaran laut; dan (iv) bidang penjagaan dan kelestarian lingkungan laut, yang pada umumnya ditangani oleh instansi pemerintah yang diberikan tugas khusus untuk hal ini.

**Tabel 3.** Unsur Keamanan dan Keselamatan Maritim dari Beberapa Sudut Pandang

Sudut Pandang	Unsur Keamanan dan Keselamatan Maritim	Kategori
Militer	Melindungi keutuhan wilayah negara	1
	Melindungi keberlangsungan negara	1
	Memperoyeksikan kepentingan negara	1
	Melindungi jalur transportasi laut	3
Pertahanan dan keamanan negara	Melindungi kebebasan bernavigasi dari kapal-kapal dagang	3
	Melindungi sumber daya laut (ikan, minyak, bahan dasar laut)	4
	Melindungi pariwisata laut dan pantai	4
	Melindungi manusia yang mencari nafkah di dan dari laut	4
	Melindungi laut dari segala kejahatan dan pelanggaran hukum	2
Industri perkapalan	Melindungi keselamatan kapal dan awaknya	3
	Melindungi kiriman barang sampai di tempat tujuan	3
	Melindungi kapalnya dari perampasan, sabotase, pembajakan	2
	Melindungi instalasi laut	4

Sumber: Diolah oleh Penulis

Keterangan:

Kategori 1: Kedaulatan negara

Kategori 2: Keamanan laut

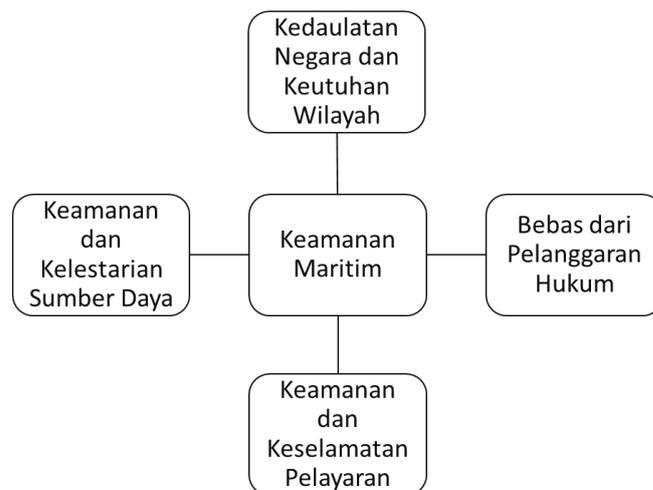
Kategori 3: Keselamatan pelayaran

Kategori 4: Kelestarian lingkungan

Berbagai pendapat tersebut kemudian dikaitkan dengan kepentingan nasional Indonesia di bidang kemaritiman. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa keamanan maritim Indonesia hendaknya secara sistematis dapat melindungi kepentingan nasional Indonesia di bidang kemaritiman. Keamanan maritim Indonesia seyogyanya diarahkan untuk dapat menciptakan kondisi-kondisi sebagai berikut (lihat Gambar 3):

1. Terpeliharanya kedaulatan negara serta keutuhan wilayah negara Indonesia.
2. Terpeliharanya kondisi keamanan kemaritiman Indonesia dari segala bentuk pelanggaran hukum dan praktik-praktik ilegal.
3. Terpeliharanya keamanan dan keselamatan pelayaran, baik pelayaran domestik maupun pelayaran internasional yang melalui perairan Indonesia.
4. Terpeliharanya keamanan dan kelestarian semua sumber daya ekonomi termasuk fasilitas yang telah dibangun yang ada di wilayah kemaritiman Indonesia.

**Gambar 3.** Unsur-Unsur Keamanan Maritim Indonesia



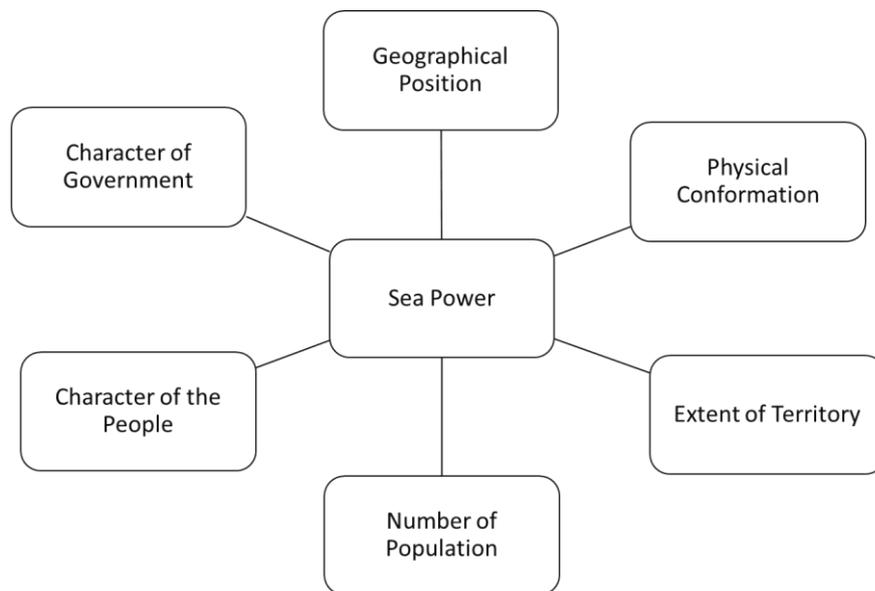
Sumber: Diolah oleh Penulis

### **Membangun Keamanan Maritim Indonesia**

Untuk menciptakan suatu kondisi dimana keamanan maritim dapat diwujudkan oleh berbagai pihak, baik institusi-institusi pemerintah maupun dari pelaku ekonomi di bidang kemaritiman, diperlukan suatu upaya sistematis untuk membangun keamanan maritim yang dapat menjawab tantangan tugas yang telah diformulasikan di bagian sebelumnya. Dalam bagian ini akan dibahas apa saja upaya yang perlu dilakukan untuk membangun

keamanan maritim Indonesia yang kuat. Menurut Alfred Thayer Mahan dalam bukunya *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*, untuk membangun kekuatan laut atau sea power yang kuat, ada beberapa kondisi yang akan sangat berpengaruh terhadap upaya tersebut, yakni (lihat Gambar 4): (i) *geographical position* atau letak geografis; (ii) *physical conformation* atau sifat fisik; (iii) *extent of territory* atau luas wilayah; (iv) *number of population* atau jumlah penduduk; (v) *character of the people* atau watak dari penduduk; dan (vi) *character of the government* atau watak dari pemerintah.<sup>15</sup>

**Gambar 4.** Elements of Sea Power (Mahan Theory)



Sumber : A. T. Mahan, *The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783*. 12<sup>th</sup> Edition, (Boston: Little, Brown, 1918), hlm. 28-29.

Dalam hal letak geografis, Mahan menjelaskan beberapa faktor yang penting untuk diperhatikan, antara lain: kekuatan laut yang dapat dikonsentrasikan atau disebar, pelabuhan laut di berbagai tempat, kedekatan dengan sasaran yang ingin diserang, akses kekuatan laut ke laut lepas, dan akses menuju jalur laut utama.<sup>16</sup> Sedangkan dalam elemen sifat fisik dari lingkungan maritim dari suatu negara, Mahan menjelaskan beberapa unsur penting, antara lain: garis pantai untuk tempat dibangunnya pelabuhan dalam (*deep harbour*) bagi kapal-kapal dagang, keamanan pelayaran, keterlibatan orang-

<sup>15</sup> A. T. Mahan, *The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783*. 12<sup>th</sup> Edition, (Boston: Little, Brown, 1918), hlm. 28-29.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 29-34.

orang dalam perdagangan di dan lewat laut, produksi dalam negeri, dan pengawasan semua bagian dari wilayah negara.<sup>17</sup>

Mahan juga menjelaskan lebih jauh tentang unsur-unsur penting yang terdapat dalam elemen luas wilayah, antara lain: panjang pantai, dan sekali lagi menekankan karakter dari pelabuhan.<sup>18</sup> Sedangkan dalam hal jumlah penduduk, Mahan menjelaskan pentingnya jumlah besar manusia yang siap untuk mengawaki kapal perang, kapal dagang, menjadi cadangan angkatan laut, mengawaki industri maritim, dan sektor ekonomi lainnya.<sup>19</sup> Dalam hal karakter nasional, dijelaskan bahwa karakter yang sangat penting adalah yang berorientasi kepada perdagangan di dan lewat laut, yang datang dari berbagai kalangan, seperti pengusaha, pedagang, produser barang-barang dagangan, serta para penghubung untuk pelayanan perdagangan. Juga diperlukan karakter yang jenius dalam menangkap peluang-peluang yang ada di dunia perdagangan di dan lewat laut.<sup>20</sup> Sedangkan untuk elemen yang terakhir, yakni karakter dari pemerintah, Mahan menjelaskan perlunya beberapa unsur, seperti pengarahannya yang cerdas dari pemerintah, keputusan yang tegas dan cepat, kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada maritim, kesatuan komando dan kendali, kebijakan yang mantap dalam memelihara kekuatan angkatan laut, memelihara kekuatan cadangan untuk angkatan laut, memelihara pangkalan-pangkalan angkatan laut yang memadai, dan membangun kekuatan armada kapal dagang yang kuat.<sup>21</sup>

Berdasarkan elemen-elemen yang berpengaruh dalam membangun kekuatan laut, maka sebenarnya Indonesia sudah memiliki sebagian besar prasyarat tersebut. Dengan luasnya wilayah negara, dan luasnya laut yang ada di Indonesia, maka bangsa Indonesia sebenarnya mempunyai kesempatan besar untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Dengan posisi negara Indonesia di antara dua benua dan dua samudera besar, maka Indonesia telah menjadi lintasan pelayaran utama dunia. Dengan jumlah penduduknya yang sangat besar, maka Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk menguasai bidang kemaritiman regional maupun global.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.35-42.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.42-4.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.44-9.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.50-7.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.58-70.

Namun kita semua menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dari bangsa Indonesia untuk menjadikannya sebagai bangsa yang kuat di laut. Beberapa upaya perlu dilakukan secara terencana dan sistematis. Dalam bagian akhir ini, akan dianalisis faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun keamanan maritim Indonesia yang tangguh. Analisis tersebut didasarkan pada pandangan dari Mahan tersebut, kemudian dihadapkan dengan unsur-unsur keamanan maritim Indonesia serta sasaran yang ingin dicapai dalam membangun keamanan maritim Indonesia yang tangguh. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam kita membangun keamanan maritim yang tangguh adalah (lihat Gambar 5): kebijakan pemerintah, kekuatan angkatan laut, kekuatan unsur-unsur keamanan laut, kekuatan armada kapal dagang, sumber daya manusia Indonesia yang profesional, perdagangan di dan lewat laut, dan pelabuhan laut. Untuk membangun keamanan maritim yang tangguh berarti kita perlu membangun atau membenahi unsur-unsur yang berpengaruh tersebut.

**Gambar 5.** Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Keamanan Maritim di Indonesia



Sumber: Diolah oleh Penulis

Kebijakan pemerintah menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun keamanan maritim yang tangguh. Kebijakan pemerintah perlu dengan sungguh-sungguh merealisasikan visi “Poros Maritim” dari Presiden Jokowi. Adapun visi tersebut sudah

disampaikan di bagian awal tulisan ini. Yang diperlukan untuk dilakukan oleh Pemerintah RI saat ini adalah menindaklanjuti visi tersebut ke dalam kebijakan yang lebih bersifat operasional, agar para pelaku bidang kemaritiman, baik pemerintah maupun swasta, mempunyai kerangka kerja yang jelas. Kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut benar-benar mencerminkan karakter pemerintah yang secara cerdas menangkap peluang keuntungan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat; teguh dalam tekadnya membangun armada kapal dagang serta berbagai pelabuhan laut yang canggih; teguh dalam tekadnya membangun kekuatan angkatan laut yang kuat dan hebat serta kekuatan cadangannya, dan teguh dalam mengendalikan semua komponen atau *stakeholders* yang terlibat agar kesatuan komando dan pengendalian dalam menangani keamanan maritim Indonesia tetap terpelihara.

Angkatan Laut Indonesia menjadi faktor kedua yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keamanan maritim Indonesia yang kuat. Kemampuan angkatan laut dibangun agar mampu melakukan tiga fungsi sekaligus yakni fungsi militer, fungsi konstabulari, dan fungsi diplomasi. Dalam hal melakukan penegakan kedaulatan di laut, maka angkatan laut harus mampu melakukan empat macam pertempuran, yakni pertempuran atas air, pertempuran bawah air, pertempuran amfibi, dan pertempuran khusus. Kekuatan angkatan laut, yang terdiri dari kapal perang, pesawat terbang, marinir dan pangkalan, dalam menyelenggarakan misinya diintegrasikan kedalam suatu sistem senjata yang utuh yang disebut SSAT (Sistem Senjata Armada Terpadu). Kekuatan tersebut perlu terus ditingkatkan agar dapat mengawasi dan mempertahankan perairan Indonesia yang sangat luas ini. Disamping penambahan kekuatan, maka sejalan dengan perkembangan ancaman masa kini, penempatan atau penggelaran kekuatan dari unsur-unsur angkatan laut perlu dikaji kembali. Diperlukan pembangunan pangkalan angkatan laut yang canggih dan memadai yang disesuaikan dengan pelaksanaan gelar operasi unsur-unsur angkatan laut.

Kekuatan unsur-unsur pemerintah yang mengemban misi penegakan hukum di laut serta menjaga pelestarian lingkungan di lingkungan maritim perlu terus ditingkatkan. Pelanggaran hukum di laut semakin marak, termasuk penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing, penyelundupan manusia, senjata, narkoba, serta barang-barang terlarang lainnya. Dengan luasnya wilayah operasi yang harus diawasi,

maka diperlukan peralatan deteksi atau *surveillance* dengan menggunakan teknologi satelit yang canggih, serta kapal-kapal dengan kemampuan dan kecepatan yang tinggi di wilayah perairan dengan kondisi ombak yang tinggi.

Armada kapal dagang Indonesia harus terus ditingkatkan, baik jumlahnya maupun ukuran kapalnya. Dengan bertambahnya kekuatan armada kapal ini, maka kemampuannya untuk mengangkut orang dan barang, domestik maupun internasional, dapat meningkat secara tajam. Perannya dalam meningkatkan roda perekonomian Indonesia sangatlah besar. Untuk menambah jumlah armada kapal dagang, baik dalam jumlah maupun ukuran kapalnya, maka semua pihak harus mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi investasi di bidang ini, baik dari pihak swasta maupun dari pihak pemerintah. Perlu ada insentif bagi pihak investor, sekaligus kemudahan dalam mendapatkan kapal-kapal baru hasil industri dalam negeri. Dengan makin banyaknya jumlah armada ini, maka kargo internasional yang selama ini didominasi oleh pihak asing secara berangsur-angsur dapat kita rebut. Armada kapal ini juga akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat konektivitas antar pulau dan wilayah di Indonesia, yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan maupun persatuan bangsa.

Sumber daya manusia Indonesia yang handal dan profesional merupakan komponen yang sangat penting bagi pembangunan keamanan maritim yang tangguh. Untuk itu perlu didorong pembentukan berbagai sekolah, universitas, lembaga pelatihan, yang akan menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang mempunyai jiwa dan semangat bahari, serta para pengusaha atau pedagang di bidang kemaritiman. Sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih tersebut diharapkan dapat menjadi pengusaha atau sebagai tenaga kerja yang siap mengisi organisasi angkatan laut, organisasi kekuatan cadangan angkatan laut, berbagai organisasi keamanan maritim, industri maritim, kapal-kapal dagang, pertambangan lepas pantai, organisasi yang memelihara kelestarian alam laut, serta organisasi yang memelihara instalasi-instalasi lepas pantai. Tenaga kerja Indonesia yang profesional itu dapat juga mengembangkan wilayah kerjanya dengan menjadi awak-awak kapal asing yang jumlahnya makin hari makin bertambah.

Perdagangan di dan lewat laut perlu didorong, dengan jalan meningkatkan volume perdagangannya. Untuk itu diperlukan peningkatan produksi berbagai bahan mentah,

bahan baku, hasil industri maritim yang dapat dihasilkan, dengan membudidayakan segenap potensi ekonomi yang ada di Indonesia. Untuk itu diperlukan berbagai inovasi dan kreativitas agar produksi di sektor ini semakin meningkat, yang didukung oleh pengaturan yang baik dan sehat agar iklim bisnis yang sehat selalu dapat dipelihara. Berbagai bentuk pasar di bidang kemaritiman perlu terus diciptakan dan dibangun agar terjadi mekanisme pasar yang sehat. Peningkatan perdagangan ini selanjutnya akan meningkatkan pendapatan negara, yang selanjutnya akan meningkatkan kemampuan negara dalam membangun kekuatan maritim Indonesia.

Pelabuhan laut memainkan peranan penting, karena menjadi tolok ukur jumlah kapal dan volume kargo yang dapat dimuat dan dibongkar. Kapal-kapal dagang dan kapal-kapal angkatan laut serta aparat keamanan negara memerlukan pelabuhan yang canggih yang dapat memberikan pelayanan yang lengkap bagi kapal-kapal yang singgah maupun yang akan mengisi dan membongkar muatannya. Berbagai pelabuhan laut harus dapat dibangun di banyak wilayah di Indonesia, baik di sepanjang pantai dari pulau-pulau yang menghadap ke laut pedalaman Indonesia, maupun di sepanjang pantai yang menghadap kelaut lepas atau bagian luar dari wilayah perairan Indonesia. Pelabuhan tersebut juga perlu dilengkapi dengan manajemen kepelabuhanan yang profesional serta dilengkapi dengan peralatan bongkar muat yang modern.

## **Kesimpulan**

Dari berbagai analisis yang dilakukan didapatkan beberapa temuan atau kesimpulan. Kepentingan nasional Indonesia di bidang maritim terdiri dari tiga elemen, yakni terjaganya keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, terjaganya sumber daya kemaritiman serta pelayaran komersial domestik dan internasional, serta tercapainya kesejahteraan bangsa Indonesia. Beberapa ancaman di wilayah perairan Indonesia yang perlu menjadi prioritas utama adalah pembajakan di laut, penangkapan ikan secara ilegal, sengketa wilayah antar negara, penyelundupan narkoba, serta penyelundupan manusia. Adapun unsur-unsur yang menjadi lingkup dari keamanan maritim Indonesia adalah kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, laut yang bebas dari pelanggaran hukum, keamanan dan keselamatan pelayaran, serta keamanan dan kelestarian sumber daya maritim. Dalam rangka menjawab permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, yaitu

88 Jurnal Pertahanan Desember 2016, Volume 6, Nomor 3

tentang membangun keamanan maritim Indonesia, maka penulis menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan keamanan maritim Indonesia yang kuat, terdapat tujuh faktor penting yang perlu diperhatikan atau dibenahi, yaitu kebijakan pemerintah, kekuatan angkatan laut, kekuatan unsur-unsur keamanan laut, kekuatan armada kapal dagang, sumber daya manusia, perdagangan di dan lewat laut, serta pelabuhan laut.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Buzan, Barry. 1983. *People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations*. Sussex: Wheatsheaf Books.
- Klein, N. et al. 2010. *Maritime Security: International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand*. Oxon: Routledge.
- Mahan, A. T. 1918. *The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783*. 12<sup>th</sup> Edition. Boston: Little, Brown.
- Winner, A. C. 2008. "India as a Maritime Power?", dalam Yoshihara dan J. R. Holmes (Eds). *Asia Looks Seaward: Power and Maritime Security*. Westport: Praeger Security International.
- Yarger, H. R. 2008. "The Strategic Appraisal: The Key to Effective Strategy", dalam J. B. Bartholomeus (Ed). *Theory of War and Strategy*. Volume I. US: US Army War College.

### Jurnal

- C. Bueger. 2015. "What is Maritime Security?". *Marine Policy Journal*. No. 53.

### Website

- Kemlu RI, "Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia", dalam <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers>, diunduh pada 19 September 2016.
- Kemenko Kemaritiman RI, "Program Kerja Kemenko Kemaritiman RI", dalam <http://maritim.go.id/program-kerja>, diunduh pada 19 September 2016.
- Kemhan RI, "Kebijakan Pertahanan 2016 Diarahkan untuk Mempercepat Implementasi Kebijakan Pertahanan Maritim", dalam <https://www.kemhan.go.id/2016/01/20>, diunduh pada 19 September 2016.

